
FACTORS AFFECTING THE DELAYED COLLECTIBLES LAND AND BUILDING TAX FOR THE SURAKARTA SOCIETIES

Supriyono¹

Diby Iskandar²

Dosen Program Studi : D – III Keuangan Perbankan

STIE ADI UNGGUL BHIRAWA

supriyono@stie-aub.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of taxpayers behavior, the tax officials behavior, the imposition of fines and Nahdatul Ulama's fatwa against the delayed of collectibles property taxes for the people of Surakarta.

The data were collected by distributing questioners and tested with testing instruments which include the validity and reliability as well as the classical assumption. Method of analyzing the data used a multiple regression analysis, t- test, f-test and R²test.

T test results obtained that the variable of tax payers' behavior, the behavior of tax officials, the imposition of fines, the NU fatwa had a significant influenced to the delayed of the collectibles of land and building tax. F-test results obtained that there was a significant relationship between the independent variables toward a dependent variable. And R² test results obtained that the free variables had a positive contribution toward a dependent variable 65,5%, the remaining 34,5% was influenced by other factors outside of the variables studied.

Keywords: Taxpayers behavior, tax officials' behavior, the imposition of fines, Nahdatul Ulama's fatwa.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH.

Pajak bumi dan Bangunan (PBB) penting dalam suatu negara baik itu Negara monarki maupun Negara demokratis, PBB akan digunakan sebagai sumber penerimaan negara yang akan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara dan seluruh kegiatan pembangunan, juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai kegiatan untuk kesejahteraan rakyat.

"The Land & Building tax was originally intended to raise finance for the operation of government and its level is meant to relate to the rental value of the property". (Afra Raymond, Real Estate, 2004, 2)

Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan. Berdasarkan undang-undang no 12 tahun 1994, pajak tersebut dipungut atas tanah dan bangunan karena

adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta di laut Indonesia (Afrizal Woyla Saputra zaini, 2011 : 2). Dan yang dimaksud Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia yang di peruntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.

Membayar pajak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan oleh semua warga Negara sebagai bentuk tanggung jawab warga Negara dalam menjalankan kehidupan bernegaranya kepada pemerintah. Pemerintah berusaha mengoptimalkan pemasukan pajak, dengan

berbagai daya upaya membentuk aturan dan peraturan yang mendukung agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, masyarakat selalu berusaha untuk menghindari pajak, karena pada umumnya manusia tidak suka membayar pajak. Menurut Djamaludin Ancok (2004), wajib pajak menghindari bayar pajak karena faktor pemerintah yang mencakup sikap pemerintah dan sikap petugas pajak serta faktor individu yang mencakup pengetahuan tentang pajak. Penghindaran itu dilakukan dengan 3(tiga) cara : 1). Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan mencari celah kelemahan peraturan. 2). Tidak melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan benar. 3). Dan menunggak membayar pajak.

1.2. PERUMUSAN MASALAH.

Pada kesempatan ini penulis ingin meneliti yang berkaitan dengan permasalahan tersebut: Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku wajib pajak, perilaku petugas pajak, penge- naan denda dan fatwa nahdatul ulama terhadap tingkat keterlambatan kolekti- bilitas PBB bagi masyarakat Surakarta?

1.3. TUJUAN PENULISAN.

Tulisan ini bertujuan untuk menge- tahui signifikansi hubungan antara perilaku wajib pajak, perilaku petugas pajak, penge- naan denda dan fatwa nahdatul ulama terhadap tingkat keterlambatan kolekti- bilitas PBB bagi masyarakat Surakarta.

II. KAJIAN TEORI

2.1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2.1.1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan undang-undang No 12 tahun 1994, pajak Bumi dan bangunan adalah pajak Negara yang dipungut terhadap Bumi dan Bangunan, sehingga besar kecilnya pungutan sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Pajak Bumi dan bangunan bersifat kebendaan yaitu besar kecilnya pajak terutang ditentukan

oleh keadaan obyek bumi/tanah ataupun Bangunan itu sendiri. Dan yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan tanah dan perairan dan tubuh Bumi yang ada di kedalaman serta di laut Indonesia.

2.1.2. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.

Subyek pajak atau lebih dikenal dengan wajib pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas tanah dan Bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut. Wajib pajak berarti, menguasai, mempunyai hak atas obyek yang dikenai pajak dan mem- peroleh manfaat atasnya. Apabila obyek pajak tidak diketahui secara jelas pemiliknya, maka Dirjen pajak berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan wajib pajaknya.

2.1.3. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang menjadi Obyek Pajak Bumi dan bangunan, sesuai Undang- Undang pajak bumi dan bangunan adalah Bumi dan bangunan baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Bumi meliputi per- mukaan dan tubuh yang ada didalamnya. Yang dimaksud per- mukaan bumi yaitu tanah dan perairan. Yang dimaksud tubuh bumi adalah segala sesuatu yang ada didalam perut bumi dan yang terdapat di bawah air. Dan yang dimaksud dengan perairan adalah perairan pedalaman serta wilayah laut Indonesia. (Undang-undang Nomer 12 tahun 1994).

Bangunan, sebagai obyek pajak Bumi dan bangunan, adalah bentuk konstruksi teknik yang ditanamkan secara permanen pada bumi dan perairan di Wilayah Republik Indo- nesia yang digunakan untuk tempat tinggal, dan atau tempat usaha dan

memberikan manfaat kepadanya. Jika seseorang atau badan mempunyai bangunan diatas tanah orang lain sehingga pemilik bangunan terpisah dengan pemilik tanah, maka Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur bahwa pemilik bangunan dikenakan pajak sendiri selain dari pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah. Hal semacam ini banyak terjadi didaerah perkotaan, banyak dibangun rumah susun dan pada setiap tingkat dimiliki oleh pemilik yang berbeda.(Undang-undang Nomer 12 tahun 1994)

2.1.4. Perilaku Wajib Pajak.

Para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya namun dalam praktek sulit berjalan sesuai yang diharapkan. Para wajib pajak sengaja tidak patuh dan cenderung mengabaikan. Faktor penyebabnya adalah :

2.1.4.1. Motivasi.

adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Swasta dan Handoko hal 75). Motif pada seseorang akan menunjukkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Orang tidak termotivasi karena tidak adanya keterbukaan atas dana pajak yang telah terkumpul. (Ancok, 2004)

2.1.4.2. Persepsi.

Persepsi dapat dirumuskan sebagai "Proses seorang individu memilih, mengorganisasi dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar yang bermakna tentang dunia" (Kotler, hal 251).

2.1.4.3. Kurangnya pengetahuan Tentang Pajak.

Secara teoritis, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu hal

harus dimulai dari pengetahuan tentang sesuatu hal tersebut. Namun dinegara ini sebagian rakyatnya belum paham betul mengenai pajak; manfaat, kegunaan dan dampaknya. Oleh sebab itu pemerintah harus proaktif mencerdaskan rakyat tentang pentingnya bayar pajak bumi dan bangunan.

2.1.5. Perilaku Petugas Pajak.

Belakangan marak diperbincangkan mengenai rekening gendut para pegawai pajak yang disinyalir pemerolehannya tidak wajar yakni dari hasil korupsi.

Perilaku oknum petugas pajak telah memperoleh predikat miring di mata masyarakat. Mereka mencoreng niat baik pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak dengan memainkan dana tersebut untuk keuntungan sendiri. Para oknum dianggap sebagai predator dan pemeras masyarakat.

2.1.6. Sistem Pengenaan Denda

Pengenaan denda terhadap wajib pajak bumi dan bangunan dimaksudkan agar para wajib pajak menjadi patuh dan tertib dalam membayar tagihan pajaknya. Dengan sistem ini diharapkan pengumpulan pajak dapat berjalan lancar dan tidak ada keterlambatan. Namun sayangnya walaupun wajib pajak mendapatkan sanksi denda, mereka tetap saja mengabaikan ancaman tersebut hal disebabkan karena terlalu ringan dan tidak efektifnya denda, denda tersebut berlaku setelah selama 10 tahun berikutnya ketika obyek pajak akan dijual.

Sanksi/denda umumnya dikenakan kepada wajib pajak yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi dibagi menjadi dua yaitu :

2.1.6.1. Sanksi Pidana.

2.1.6.2. Sanksi Administratif.

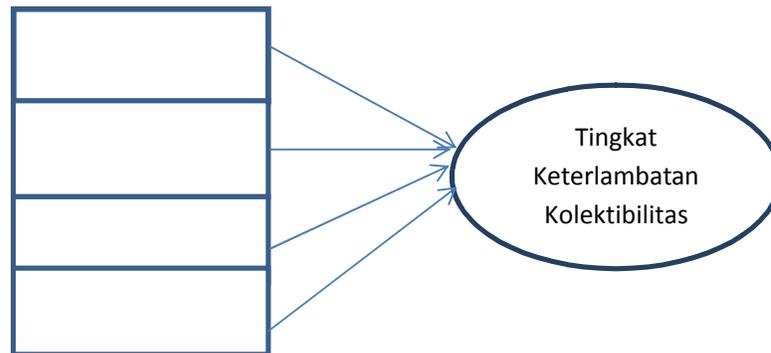
2.1.7. Fatwa Nadatul Ulama

Musyawah Nasional Alim ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Cirebon membahas fatwa agar umat Islam, NU khususnya tidak membayar pajak, selama praktik korupsi masih hidup dan berlangsung di tanah air. Wacana ini merupakan cambuk dan peringatan keras bagi pemerintah untuk merealisasikan komitmen pemberantasan korupsi. Peringatan dan larangan ini jangan dianggap sepele, mengingat sebagai sebuah organisasi, Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab terhadap Negara ini. NU menangkap bahwa korupsi dana pajak sudah membahayakan bangsa ini. Dan jika keadaan dibiarkan tak terkendali akan membahayakan kehidupan umat. Selama ini

pengelolaan pajak di Indonesia masih carut marut dan diperparah lagi dengan adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pegawai pajak, baik dari tingkat staff sampai pejabat tinggi. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya bila warga nadliyin patuh dan taat terhadap fatwa ini.

Pembangunan, yang sumber dananya sebagian terbesar dari pajak pasti akan lumpuh. NU mewacanakan bahwa korupsi dan pengemplangan pajak adalah tindakan subversi dan bahaya laten yang sama bahayanya dengan komunisme. Negara Indonesia akan bubar jika persoalan korupsi dan pajak tidak diperhatikan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya para koruptor di hukum mati untuk memberikan efek jera kepada para calon pengemplang lain.

III. KERANGKA PEMIKIRAN.



Gambar 2 : Kerangka Pemikiran (Kotler, 2002)

IV. METODOLOGI PENELITIAN

4.1. OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN

4.1.1. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah warga masyarakat Kota Surakarta yang terdapat pada 51 Kelurahan yang menjadi subyek pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

4.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kota Surakarta

4.2. POPULASI DAN SAMPLE

Populasi penelitian ini adalah para wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di wilayah kota Surakarta. Dengan metode pengambilan sample simple random sampling artinya sample yang dikehendaki dapat diambil secara seimbang (Arikunto,2004:126), sedangkan Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2004:124). Jadi dalam penelitian ini sample diambil 100 wajib pajak bumi dan bangunan sebagai responden.

Sumber data.

4.2.1. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari individu yang diteliti melalui kuesener.

4.2.2. Data Sekunder.

Adalah data yang didapatkan melalui kajian pustaka dan sumber lainnya.

4.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

4.3.1. Kuesener.

Kuesener disusun berdasarkan skala likert dengan urutan skala 1,2,3,4,5. Dan mempunyai kriteria jawaban sebagai berikut :

- a. jawabab sangat setuju : Skor 5
- b. Jawaban Setuju : Skor 4
- c. Jawaban Netral : Skor 3
- d. Jawaban Tidak setuju : Skor 2
- e. Jawaban Sangat tak setuju : Skor 1

4.3.2. Wawancara.

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan responden ataupun pihak-pihak yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan.

4.4. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

4.4.1. Perilaku wajib Pajak (X1).

Adalah suatu sikap yang ditunjukkan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak terutangnya. Indikatornya adalah :

- a). Patuh.
- b). Sadar
- c). Tanggung Jawab.
- d). Tertib.
- e). konsekuen.

4.4.2. Perilaku Petugas Pajak (X2).

Adalah suatu sikap pelayanan yang harus diberikan kepada wajib pajak. Indikatornya adalah :

- a). ramah
- b). bersahabat.
- c). cepat tanggap
- d). Menyampaikan SPPT tepat waktu
- e) Komunikatif.

4.4.3. Sistem Pengenaan denda (X3).

Adalah suatu aturan yang diterapkan oleh pemerintah, agar para wajib pajak mempunyai tanggung jawab membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Indikatornya adalah :

- a. dendanya terlalu ringan.
- b. tidak ada tindak lanjut atas tagihan.
- c. denda berlaku setelah 10 tahun.
- d. tidak efektifnya sanksi administrative.

4.4.4. Fatwa Nahdlatul Ulama (X4).

Adalah upaya dari para tokoh NU untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah agar melaksanakan komitmen pemberantasan korupsi secara sungguh-sungguh. Indikatornya adalah ;

- a. sanksi tegas kepada koruptor pajak.
- b. keadilan penentuan beban pajak.
- c. tidak adanya fairness tentang pajak.
- d. Mengharamkan bayar pajak.

4.4.5. Keterlambatan Kolektibilitas (Y).

Adalah upaya pengumpulan dana pajak yang terhambat karena adanya faktor tersebut diatas. Indikatornya adalah :

- a). target waktu pengumpulan.
- b). target jumlah uang.
- c). kekurangan tenaga lapangan.
- d). keterlambatan penyampaian SPPT
- e). Kurang proaktif.

4.5. ANALISIS DATA

4.5.1. Analisis Instrumen Penelitian.

4.5.1.1. Uji Validitas.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Cara pengujiannya adalah dengan mengkoreksikan antar skor totalnya. Adapun teknik korelasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi (productmoment (Sugiyono,1999:18) Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut :

$$R_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

R_{xy} : koefisien korelasi.
 X : skor butir
 Y : skor factor
 n : Jumlah responden

4.5.1.2. Uji Reliabilitas.

Analisis reliabilitas menunjukkan pada pengertian apakah instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Ukuran

dilakukan reliabel jika ukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Reliabilitas diukur dengan menggunakan metode cronbach alpha.

Rumus Cronbach alpha:

$$\left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right] \text{ (Arikunto, 2000:193)}$$

Keterangan:

r = reliabilitas instrumen
 k = banyaknya butir pertanyaan
 $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir
 σ_t^2 = varians total

4.6. Pengujian Hipotesis

4.6.1. Uji Asumsi klasik.

Uji normalitas.

Uji normalitas Data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data akan digunakan alat uji Smirnov kolmogorof dengan bantuan SPSS. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 pada taraf signifikansi (α) = 5% (Ghozali, 2005 : 115). Rumus yang digunakan secara manual adalah $D = \text{maksimum} [S_n1(X) - S_n2(X)]$

Keterangan :

D = Nilai Kritis.

S_{n1} = standar deviasi fungsi distribusi empiris.

S_{n2} = standar deviasi fungsi distribusi kumulatif. (Ghozali, imam, 2005)

Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang : Badan Penerbit : Undip Semarang.

4.6.2. Uji Multikolinearitas.

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Untuk menguji multikolinearitas akan digunakan angka Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Sebuah model regresi akan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka tolerance lebih besar dari 0,10. (Ghozali, 2005 : 92).

4.6.3. Uji Heteroskedastisitas.

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah varian dalam model regresi adalah sama. Uji ini akan dilakukan dengan uji glejser yaitu dengan melakukan regresi antara variabel absolut untuk nilai residual dengan variabel independen. Uji ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Model regresi menjadi model yang efisien atau terbebas dari heteroskedastisitas apabila terjadi nilai t hitung tidak signifikan atau dibawah 0,05. (Ghozali, 2005 : 108).

4.6.4. Uji Autokorelasi.

Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel yang diteliti. Untuk mengetahui hal tersebut akan digunakan angka Durbin Watson dalam tabel derajat dan tingkat signifikansi tertentu. Untuk menentukan apakah dalam model regresi terdapat autokorelasi atau tidak, dapat dilihat pada ketentuan berikut :

- a. Apabila nilai DW < dl maka ada korelasi positif.
- b. Apabila nilai DW terletak antara dl ≤ dw ≤ du maka tidak ada kesimpulan.
- c. Apabila nilai DW terletak antara dl < dw < 4 -du, maka tidak ada korelasi positif maupun negatif.
- d. Apabila nilai DW terletak antara 4-du ≤ d ≤ dl, maka kita tidak dapat mengambil keputusan apa-apa.
- e. Apabila nilai DW > 4-dl, maka ada korelasi positif. (Ghozali, 2005 : 96).

4.6.5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Model 1} = Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

(Sugiyono, 1999: 293).

Keterangan:

Y= Tingkat keterlambatan Kolektibilitas

X₁ = Perilaku wajib pajak

X₂ = Perilaku petugas pajak.

X₃ = sistem pengenaan denda

X₄ = Fatwa NU

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = error/kesalahan

Untuk melakukan analisis linier berganda digunakan bantuan komputer dengan program SPSS versi 10 for Windows

4.7. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah perilaku wajib pajak, perilaku petugas pajak, Sistem denda dan fatwa

NU secara parsial mempunyai pengaruh terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.

a). Rumus Perhitungan.

$$t \text{ hitung} = \frac{b - \beta}{Sb}$$

(Djarwanto Ps dan Subagyo, 1993: 164)

Keterangan:

b = Koefisien regresi

β = Nilainya nol

Sb = Standard error of regression coefficient

b). Kriteria Keputusan

Ho diterima apabila nilai t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Ho ditolak apabila nilai t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

4.8. Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara perilaku wajib pajak, perilaku petugas pajak, Sistem denda dan fatwa NU terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.

4.8.1. Kriteria pengujian.

Nilai F hitung:

$$F \text{ hitung} = \frac{SSR / k}{SSE / n - 1 - k}$$

(Djarwanto Ps dan Subagyo, 1993: 166)

Keterangan:

SSR= Sum of Square Regression

SSE= Sum of Square Residual

K = Banyaknya variabel bebas

n = Banyaknya sampel

4.8.2. Kriteria Keputusan

Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai F hitung ≤ F tabel, artinya variabel independen tidak mempe-

ngaruhi variabel dependen secara signifikan.

Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai F hitung > F tabel, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

4.9. Uji koefisien determinasi (R^2)
Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan indek keeratan, yang menyatakan proporsi dari variabel total Y (variabel dependen/terikat) yang dapat diterangkan oleh variabel total X (variabel independen/bebas). Koefisien determinasi dinyatakan dalam persen tase. Adapun rumus R^2 adalah:

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

(Makridakis et. Al, 1999: 222)

Keterangan:

$$\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 = \text{Sum of Square yang diterangkan}$$

$$\sum (Y_i - \bar{Y})^2 = \text{Sum of Square total}$$

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Obyek Penelitian.

Kota Surakarta dengan luas wilayah 44,04 km² didiami penduduk sebanyak 536.498 jiwa, terdiri dari 265.166 jiwa laki-laki dan 271.332 jiwa perempuan, Penduduk ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu 170.430 jiwa (31,77%), sedangkan Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 50.559 Jiwa (9,42%). (BPS, 2009 : 5).

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin nampak bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan

jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat diseluruh kecamatan yang ada.

5.2. Analisis Data

5.2.1. Uji Validitas Validitas item pertanyaan untuk variabel Perilaku Wajib Pajak (X_1)

Variabel Perilaku Wajib Pajak terdiri dari 4 item pertanyaan. Pengujian validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dan didapatkan hasil pada tabel IV.1

Tabel IV.1

Korelasi item pertanyaan variable perilaku wajib pajak

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1-1	0,725	0,194	valid
X1-2	0,681	0,194	valid
X1-3	0,521	0,194	Valid
X1-4	0,651	0,194	valid

Sumber : data yang diolah 2013

Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa dari 4 item pertanyaan kesemuanya valid

5.2.2. Validitas item pertanyaan untuk variabel Perilaku Petugas Pajak (X_2)

Variabel Perilaku Petugas Pajak terdiri dari 4item pertanyaan. Pengujian validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dan didapatkan hasil pada tabel IV.2

Tabel IV.2

Korelasi item pertanyaan variable perilaku Petugas pajak

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2-1	0.811	0,194	valid
X2-2	0,783	0,194	valid
X2-3	0,792	0,194	valid
X2-4	0,757	0,194	valid

Sumber : data yang diolah 2013

Tabel IV.2, diatas menunjukkan bahwa dari 4 item pertanyaan kesemuanya valid Validitas

5.2.3. item pertanyaan untuk variabel Pengenaan Denda (X_3)
 Variabel Pengenaan Denda terdiri dari 4 item pertanyaan. Pengujian validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dan didapatkan hasil pada tabel IV.3.

Tabel IV.3
 Korelasi item pertanyaan variable pengenaan Denda

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X3-1	0,903	0,194	valid
X3-2	0,869	0,194	valid
X3-3	0,926	0,194	valid
X3-4	0,900	0,194	valid

Sumber : data yang diolah 2013.

Tabel IV.3, diatas menunjukkan bahwa dari 4 item pertanyaan kesemuanya valid

5.2.4. Validitas item pertanyaan untuk variable Fatwa Nahdatul Ulama (X_4).
 Variabel Fatwa Nahdatul Ulama terdiri dari 4 item pertanyaan. Pengujian validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dan didapatkan hasil pada tabel IV.4

Tabel IV.4
 Korelasi item pertanyaan variable Fatwa NU

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X4-1	0,635	0,194	valid
X4-2	0,620	0,194	valid
X4-3	0,464	0,194	valid
X4-4	0,509	0,194	valid

Sumber : data yang diolah 2013.

Tabel IV.4, diatas menunjukkan bahwa dari 4 item pertanyaan kesemuanya valid.

5.2.5. Validitas item pertanyaan untuk variable Keterlambatan Kolektibilitas (Y)

Variabel Keterlambatan Kolektibilitas terdiri dari 4 item pertanyaan. Pengujian

validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} dan didapatkan hasil pada tabel IV.5.

Tabel IV.5
 Korelasi item pertanyaan variable Keterlambatan Kolektibilitas

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y-1	0,397	0,194	valid
Y-2	0,534	0,194	valid
Y-3	0,578	0,194	valid
Y-4	0,606	0,194	valid

Sumber : data yang diolah 2013.

Tabel IV.5, diatas menunjukkan bahwa dari 4 item pertanyaan kesemuanya valid

5.3. Uji Reliabilitas.

Uji reliabilitas ditunjukkan pada table-tabel berikut :

Tabel IV.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Alpha cronbach	Kriteria	Keterangan
Perilaku Wajib Pajak	0,810	Alpha Cronbach > 0,60 maka reliabel	reliabel
Perilaku Petugas Pajak	0,904		reliabel
Pengenaan denda	0,958		reliabel
Fatwa Nahdatul Ulama	0,745		reliabel
Keterlambatan Kolektibilitas	0,733		reliabel

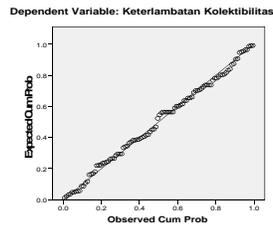
Sumber : Data yang diolah 2013.

5.3.1. Uji Persyaratan regresi.

5.3.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menghasilkan grafik normal probability plot yang tampak pada gambar berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Grafik

normal probability plot di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, titik-titik pada p-p plot menyebar sesuai dengan garis diagonal maka data dapat dikatakan normal.

5.3.1.2. Uji Autokorelasi

Uji korelasi yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin Watson. Jika nilai Durbin-Watson (DW-test) terletak antara d_u dan $(4-d_u)$ maka tidak terjadi autokorelasi dalam model

- a. Predictors : (Constant), Fatwa Nahdatul Ulama, Perilaku Wajib Pajak, Perilaku Petugas Pajak, Pengenaan Denda
- b. Dependen Variabel: Keterlambatan Kolektibilitas

dari tabel di atas dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,758 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 100 dan jumlah variabel bebas 4, maka di tabel Durbin-Watson akan didapat nilai d_Ldan d_U

5.3.1.3. Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apabila dalam model terdapat korelasi sempurna diantara masing-masing variable bebasnya. Variabel yang tidak menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari Nilai VIF (Variance Inflation Factor) sebagai mana disajikan pada table berikut :

Tabel IV.7

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,818 ^a	,668	,665	1,182	1,758

Tabel.IV.8

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig	Collinearity statistic	
	B	Std. error	Beta			Tolerance	VIF
1. (constant)	2,052	1,304		1,574	,119		
Perilaku wajib pajak	,448	,064	,422	7,021	,000	,968	1,033
Perilaku petugas pj	,124	,038	,206	3,295	,001	,893	1,120
Pengenaan Denda	,271	,039	,541	6,935	,000	,574	1,744
Fatwa nahdatul ulm	,018	,058	,023	,303	,763	,590	1,694

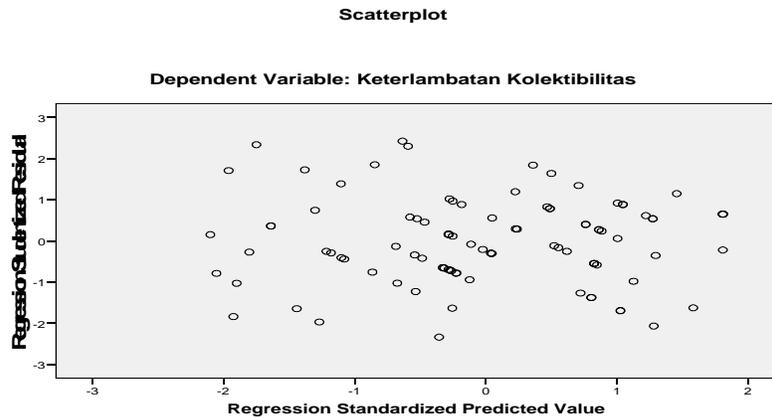
Coefficients

Dependent variable : Keterlambatan Kolektibilitas

Hasil uji multikolinieritas diatas diketahui besarnya , VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.

5.3.1.4. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas menghasilkan grafik pola penyebaran titik (scatter plot) seperti tampak pada gambar berikut :



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji Regresi Linier Berganda.

5.3.1.5. Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Linier Regression analysis).

Hasil analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16 for Windows adalah :

Tabel. IV.9

Coefficients

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficient	t	Sig	Collinearity statistic	
	B	Std. error	Beta			Tolerance	VIF
1. (constant)	2,052	1,304		1,574	,119		
Perilaku wajib pajak	,448	,064	,422	7,021	,000	,968	1,033
Perilaku petugas pjg	,124	,038	,206	3,295	,001	,893	1,120
Pengenaan Denda	,271	,039	,541	6,935	,000	,574	1,744
Fatwa nahdatul ulm	,018	,058	,023	,303	,763	,590	1,694

Dependent variable : Keterlambatan Kolektibilitas

Berdasarkan table diatas maka persamaannya adalah :

$$Y = 2,052 + 0,448 X_1 + 0,128 X_2 + 0,271 X_3 + 0,081 X_4$$

(0,119) (0,000)** (0,001)** (0,000)** (0,763)

Dari persamaan tersebut diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut :

- 1). $\alpha = 2,052$, persamaan regresi mempunyai konstanta sebesar 2,052 artinya apabila variable perilaku wajib pajak (X_1), perilaku petugas pajak (X_2), pengenaan denda (X_3) dan Fatwa nahdatul ulama (X_4) konstan maka

tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak akan meningkat.

- 2). $\beta_1 = 0,448$. Artinya apabila interaksi antara perilaku petugas pajak (X_2), pengenaan denda (X_3) dan Fatwa nahdatul ulama (X_4) sama dengan nol maka dengan adanya tambahan variable perilaku wajib pajak (X_1) sebesar satu satuan maka akan

mengakibatkan peningkatan tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak Bumi dan bangunan. Jadi variable perilaku wajib pajak berasosiasi positif terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.

- 3). $\beta_2 = 0,128$, Artinya apabila interaksi antara perilaku wajib pajak (X1), pengenaan denda (X3) dan Fatwa nahdatul ulama (X4) sama dengan nol maka dengan adanya tambahan variable perilaku petugas pajak (X2) sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak Bumi dan bangunan. Jadi variable perilaku petugas pajak berasosiasi positif terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.
- 4). $\beta_3 = 0,271$. Artinya apabila interaksi antara perilaku wajib pajak (X1), perilaku petugas pajak (X2), dan Fatwa Nahdatul Ulama (X4) sama dengan nol

maka dengan adanya tambahan variable Pengenaan Denda (X3) sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak Bumi dan bangunan. Jadi variable pengenaan denda pajak berasosiasi positif terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.

- 5). $\beta_4 = 0,081$. Artinya apabila interaksi antara perilaku wajib pajak (X1), perilaku petugas pajak (X2), dan Pengenaan denda (X3) dan sama dengan nol maka dengan adanya tambahan variable Fatwa Nahdatul Ulama (X4) sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak Bumi dan bangunan. Jadi variable Fatwa Nahdatul Ulama berasosiasi positif terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.

5.3.1.6. Uji t

Coefficients

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig	Collinearity statistic	
	B	Std. error	Beta			Tolerance	VIF
1. (constant)	2,052	1,304		1,574	,119		
Perilaku wajib pajak	,448	,064	,422	7,021	,000	,968	1,033
Perilaku petugas pjk	,124	,038	,206	3,295	,001	,893	1,120
Pengenaan Denda	,271	,039	,541	6,935	,000	,574	1,744
Fatwa nahdatul ulm	,018	,058	,023	,303	,763	,590	1,694

Dependent variable : Keterlambatan Kolektibilitas

Dari Uji t diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Perilaku Wajib Pajak, Perilaku Petugas Pajak dan Pengenaan Denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keterlambatan Kolektibilitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel < 0,05. Sedangkan Fatwa Nahdatul Ulama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Keterlambatan Kolektibilitas.

- a). Uji t, Perilaku Wajib Pajak (X1) terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas (Y).

Hasil perhitungan diperoleh nilai $t_{hitung} 7,021 >$ dari $t_{tabel} 0,194$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga variable perilaku wajib pajak (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas (Y).

- batan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.
- b). Uji t, Perilaku Petugas Pajak (X2) terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas (Y). Hasil perhitungan diperoleh nilai $t_{hitung} 3,295 >$ dari $t_{tabel} 0,194$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga variable perilaku petugas pajak.(X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.
- c). Uji t, Pengenaan denda (X3) terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas (Y). Hasil perhitungan diperoleh nilai $t_{hitung} 6,935 >$ dari $t_{tabel} 0,194$ dengan nilai signifikansi

- $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga variable pengenaan denda (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.
- d). Uji t, Fatwa Nahdatul Ulama (X4) terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas (Y). Hasil perhitungan diperoleh nilai $t_{hitung} 0,303 >$ dari $t_{tabel} 0,194$ dengan nilai signifikansi $0,763 > 0,05$ maka H_0 diterima sehingga variable Fatwa Nahdatul Ulama (X4) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan.

5.3.1.7. Uji F.

Digunakan untuk melakukan pengujian signifikansi semua variable bebas secara serempak atau bersama-sama terhadap variable terikat. Jika hasil yang didapat dari pengujian tersebut nilai $p \text{ value} < 0,05$

maka variable bebas berpengaruh terhadap variable terikat. Hasil uji ketepatan model disajikan dalam table dibawah:

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	267,504	4	66,876	47,892	,000 ^a
	Residual	132,656	95	1,396		
	Total	400,160	99			

a. Predictors: (Constant), Fatwa Nahdatul Ulama, Perilaku Wajib Pajak, Perilaku Petugas Pajak, Pengenaan Denda

b. Dependent Variable: Keterlambatan Kolektibilitas

Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 47,891$ signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi variabel terikat Keterlambatan Kolektibilitas.

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan menerangkan dari variable bebas terhadap variable terikat dalam suatu model regresi (goodness of fit) dari persamaan regresi. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Jika $R^2 = 1$ maka model tersebut sangat sempurna.

5.3.1.8. Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,818 ^a	,668	,655	1,182	1,758

a. Predictors: (Constant), Fatwa Nahdatul Ulama, Perilaku Wajib Pajak, Perilaku Petugas Pajak, Pengenaan Denda

b. Dependent Variable: Keterlambatan Kolektibilitas

Dari asil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistic terhadap 100 responden dengan quesenaire didapat nilai R^2 sebesar 0,655. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan variable – variable bebasnya memberikan sumbangan positif sebesar 65,5% terhadap variable terikat. Sedangkan sisanya sebesar 34,5% dipengaruhi oleh factor lain di luar model yang diteliti. Implikasi Manejerial.

5.3.1.9. Perilaku Wajib Pajak.

Variabel Perilaku Wajib pajak memberikan pengaruh terbesar terhadap keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan dengan nilai koefisiensi regresi 0,448. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah khususnya dinas perpajakan. Mengingat pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Sudah sepantasnya dinas perpajakan secara terus menerus menyadarkan masyarakat agar taat dan patuh dalam membayar pajak. Dinas pajak jangan bosan memberikan penyuluhan dari kampung-kekampung agar masyarakat benar-benar mengetahui betapa pentingnya uang pajak yang mereka bayarkan dan jangan sampai mereka membayar terlambat. Keterlambatan menyebabkan

macetnya pembangunan yang dilaksanakan saat sekarang.

3.3.1.10. Pengenaan Denda.

Variabel Pengenaan Denda mempunyai pengaruh terbesar kedua terhadap tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak dengan nilai koefisien regresi 0,271. Hal ini menunjukkan betapa tidak pentingnya denda yang diberlakukan kepada para wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya. Di dendapun mereka tetap mengabaikan. Menyadarkan masyarakat dengan sedikit dipaksa menurut saya ada baiknya karena tidak semua orang memiliki tingkat disiplin yang sama. Para wajib pajak perlu didenda tetapi bagi yang tepat waktu perlu mendapatkan reward, Dinas pajak perlu memikirkan tentang reward tersebut agar masyarakat tahu bahwa yang berdisiplin dalam membayar pajak akan mendapatkan keuntungan dengan pengurangan atas beban pajak yang harus dibayar misalnya 10%. Dan tentunya yang terlambat di denda sesuai dengan aturan yang ada. Denda itu diberlakukan secara tegas dan efektif.

3.3.1.11. Perilaku Petugas pajak.

Perilaku petugas pajak, nilai koefisien regresi 0,124, perlu diperbaiki dalam pelayanan kepada masyarakat. Petugas pajak harus memiliki sikap tanggap terhadap keluhan masyarakat, sikap 3S : senyum,sapa, silahkan harus dibudayakan

dikalangan petugas pajak, jangan sebaliknya bersikap angker dan menakutkan karena merasa dibutuhkan. Mereka harus komunikatif kepada masyarakat pembayar pajak terhadap segala perubahan mengenai pajak. Ramah dan supel akan menjadikan pembayar pajak suka dan senang mendapatkan pelayanan. Dan jika budaya semacam ini dapat berkembang tidak mustahil pajak akan dapat meningkat setiap tahunnya.

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan.

Dari hasil analisis dengan menggunakan regresi linier berganda dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

6.1.1. Variabel Perilaku Wajib Pajak.

Variabel Perilaku Wajib Pajak mempunyai nilai koefisiensi terbesar dari ke empat variable yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pembayar pajak masih memiliki kesadaran rendah terhadap kewajiban membayar pajak itu karena penerimaan pajak sebagian telah diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak mpedulikan bahwa pajak adalah pendapatan negara terbesar yang kegunaannya akan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat, mereka rasanya ingin melakukan sabotase dengan ramai-ramai tidak membayar pajak. Kurang sadarnya mereka perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dinas perpajakan seharusnya mencari tahu penyebabnya dan bertindak arif, terbuka dan menemukan solusinya. Dinas pajak harus terus menerus melakukan penyadaran kepada mereka agar kondisi demikian segera berubah.

6.1.2. Variabel Pengenaan Denda.

Variabel Pengenaan Denda mempunyai nilai koefisiensi terbesar kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat tidak ingin membayar pajak. Di dendapun mereka

tidak merasa takut, penyebabnya mungkin karena pajak yang mereka bayarkan banyak diselewengkan dan tidak jelas keperuntukkannya seperti yang disiarkan melalui media massa. Masyarakat capek, jenuh dan marah terhadap para pegawai pajak yang dengan seenaknya menggunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi dan pada akhirnya hukuman yang diberikanpun tidak sebanding dengan nilai yang mereka korupsi. Untuk mengatasi hal itu tentunya pemerintah harus memberlakukan hukuman yang seberat-beratnya kepada para koruptor pajak. Kalau perlu mereka harus di hokum mati.

6.2. Kelemahan.

Penelitian ini mengandung banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam hal pemilihan variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan empat variable bebas yaitu variable Perilaku Wajib Pajak, Perilaku Petugas Pajak, Pengenaan Denda dan Fatwa Nahdatul Ulama dan satu variable terikat yaitu tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan sedangkan variable yang dapat mempengaruhi tingkat keterlambatan kolektibilitas pajak bumi dan bangunan masih banyak dan tidak diteliti oleh peneliti.

6.3. Saran

Dari hasil analisis tersebut penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui dinas pajak perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang membayar pajak. Bayar pajak itu wajib hukumnya bagi masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan, karena dana yang terkumpul dari hasil pembayaran pajak pada akhirnya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat kembali. Jadi dengan kata lain, membayar pajak itu tidak rugi. Namun sebaliknya jika pajak tidak

dibayar maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan.

2. Pemerintah perlu meninjau ulang tentang aturan pengenaan denda sebab aturan yang ada sekarang dirasa kurang efektif dan belum memberikan efek jera kepada masyarakat. Walaupun akhirnya para wajib pajak membayar, mereka pada umumnya selalu mencari celah dan kelemahan peraturan agar mereka dapat membayar pajak di akhir masa berlakunya, tetapi seandainya peraturan denda itu tegas maka saya yakin para wajib pajak akan membayar SPPTnya tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ancok, Djamaludin, 2004. Psikologi Terapan. Yogyakarta. Blog Archive.
- Afra Raymond, 2004. Property Matters, Article. Singapore.
- Afrizal Woyla saputra Zaini, 2011. Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Penunjang Pembangunan Di daerah. Penerbit Univ Padang.
- Arikunto. Suharsini. 2004. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta tahun 2009.
- Basu swastha dan Handoko. 1997. Manajemen Pemasaran; Analisis Perilaku Konsumen. Yogyakarta : Liberty.
- Basu swastha dan Irawan. 2005. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta : Liberty.
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagya. 2000. Statistik Induktif. Yogyakarta : BPFE.
- Ghozali, Imam, 2005. Metode Penelitian Bisnis. Semarang : FE Undip.
- Kotler, Philip, 2000, Dasar-dasar Pemasaran. Prentice Hall edisi Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- _____, 2007, Manajemen Pemasaran: Analisis Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian. Prentice Hall edisi Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 1994. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomer 12 tahun 1994